

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB
DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Ranni Anggraeni
Nim : 222018019

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB
DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Serjana
Akuntansi Pada
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Ranni Anggraeni
Nim : 222018019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ranni Anggraeni
Nim : 222018019
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah Terhadap
Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana sastra I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan. Rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan bimbingan.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,

Ranni Anggraeni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

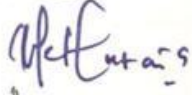
Judul : Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah Terhadap
Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan
Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan.
Nama : Ranni Anggraeni
Nim : 222018019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari
2022

Pembimbing I


Darmayanti, S.E., M.M
NIDN: 0219057901

Pembimbing II


Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si
NIDN: 0209118703

Mengetahui
Dekan
Program Studi Akuntansi


Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0216106902

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.

Buatlah jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak”

(ralph Waldo Emerson)

“ikuti saja alur jalan ini seperti air mengalir”

(Ranni Anggraeni)

Terucap syukur kepada mu, Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ayah dan Mama yang selalu
memberikan semangat dan doa*
- ❖ Adik-adikku dan keluarga besarku*
- ❖ Pembimbing Skripsi*
- ❖ Teman-teman seperjuangan*
- ❖ Almamater*



PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'Alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melindungi, mencurahkan rahmat, dan hidayahNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan” Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strat Satu (S1) guna meraih gelar Serjana Akuntansi di Unuversitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka peemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimilikinya, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih yang pertama penulis sampaikan kepada Allah SWT, kemudian kepada kedua orang tua Ayahanda Nuri dan ibunda Rahmawani serta keluarga yang telah mendoakan dan memotifasi saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Darmayanti,S.E.,M.M dan Ibu Nurul Hutami Ningsih,S.E.,M.Si selaku pembimbing penulis dan dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah

membimbing dan memberikan masukan guna menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri,S.E.,M.Si.,Ak.,CA Selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E.,M.Si,Ak.,CA dan Bapak Gumulya Sunny Marcel K, S.E.,M.Si yang berkenan memberikan telaah terhadap proposal dalam seminar usulan penelitian.
6. Bapak Eman Satria, S.E.,M.M,Ak.,CA dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan yang telah memberikan data keuangan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepada orang tua dan keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan semangat, do'a dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Diriku sendiri yang sudah berjuang untuk tidak menyerah

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang di berikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Meski demikian mudah-mudahan dari laporan penulisan ini tetap ada manfaat yang dapat di peroleh. Aamiin.

Palembang, Maret 2022
Penulis

Ranni Anggraeni

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN COVER.....	i	
HALAMAN JUDUL.....	ii	
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii	
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v	
PRAKATA.....	vi	
DAFTAR ISI.....	ix	
DAFTAR TABEL.....	xi	
DAFTAR GAMBAR.....	xii	
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii	
ABSTRAK.....	xiv	
ABSTRACT.....	xv	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		
Masalah.....	1	
B. Rumusan Masalah.....		10
C. Tujuan Penelitian.....		11
D. Manfaat Penelitian.....		11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, DAN HIPOTESIS		
A. Kajian Pustaka.....		12
1. Karakteristik Pemerintah Daerah.....	12	
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	14	
3. Standar Akuntansi Pemerintah.....	16	
4. Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	20	
B. Kerangka Pikira.....		25
C. Hipotesis.....		27
BAB III METODELOGI PENELITIAN		
A. Jenis Penelitian.....		28

B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasional Variabel.....	29
D. Populasi Dan Sampel.....	30
E. Data Yang Diperlukan.....	30
F. Metode Pengumpulan Data.....	31
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian.....	40
1. Stastistik Deskriptif.....	40
2. Uji Asumsi Klasik.....	42
3. Uji Hipotesis.....	47
C. Hasil Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	54
B. Keterbatasan Penulis.....	54
C. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel I.I.....	7
Tabel II.I.....	24
Tabel III.I.....	29
Tabel IV.I.....	41
Tabel IV.II.....	43
Tabel IV.IV.....	47
Tabel IV.V.....	48
Tabel IV.VI.....	49
Tabel IV.VII.....	50

TABEL GAMBAR

Gambar II.I.....	27
Gambar IV.I.....	39
Gambar IV.II.....	42
Gambar IV.III.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Item Pengungkapan Wajib LKPD

Lampiran 2 Tabel Uji t

Lampiran 3 Tabel Uji f

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Fotocoy surat keterangan riset dari tempat penelitian

Lampiran 6 Fotocopy sertifikat membaca dan menghafal Al-Qur'an

Lampiran 7 Fotocopy sertifikat SPSS

Lampiran 8 Fotocopy sertifikat yang dimiliki

Lampiran 9 Fotocopy Plagiarisme

Lampiran 10 Biodata Penulis

ABSTRAK

Ranni Anggraeni, (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah Terhadap Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dibimbing oleh Pembimbing I Darmayanti,S.E.,M.M dan Pembimbing II Nurul Hutami Ningsing,S.E.,M.Si.

Pemerintahan Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu objek. Jumlah SKPD adalah perangkat suatu daerah pada pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan hasil uji parsial penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah SKPD pada tahun 2017 sampai dengan 2019.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa Karakteristik Pemerintahan Daerah yang telah di proksikian melalui Ukuran Pemerintah signifikan terhadap pengungkapan wajib dan Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tidak signifikan.

Kata kunci : *Karakteristik Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah, SKPD dan Pengungkapan Wajib.*

ABSTRACT

Ranni Anggraeni, (2022). *The Influence of Local Government Characteristics on Mandatory Disclosure in Local Government Financial Statements. Supervised by Supervisor I Darmayanti, S.E., M.M and Supervisor II Nurul Hutami Ningsing, S.E., M.Si.*

Regional Government as the party given the task of running government, development and public services is required to carry out transparency and accountability in financial management in order to create a clean government. Size is a scale or nominal that shows how big or small an object is. The number of SKPD is the apparatus of a region in the regional government that functions as a center for regional development accountability, led by the head of the work unit as the budget user/goods user.

Based on the results of partial hypothesis testing, this study shows that the size of the local government has a significant effect on the financial statements of the South Sumatran regional government in 2017 to 2019. Based on the results of the partial test, this study shows that the number of SKPD in 2017 to 2019.

Based on the results of data processing, it can be concluded that the Characteristics of Regional Governments that have been proxied through Government Size are significant on mandatory disclosure and the Number of Regional Apparatus Work Units (SKPD) on the Level of Compulsory Disclosure of Regional Government Financial Reports is not significant.

Keywords : *Characteristics of Local Government, Government Size, SKPD and Mandatory Disclosures.*

No	Nama	NIM	Keterangan
	Ranni Anggraeni	222018019	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Dalam rangka mewujudkan tata Kelola yang baik (*good public governance*), pemerintahan terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha pengelolaan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolannya ialah mencakup penyajian laporan keuangan Pemerintahan Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Dearah. Pelaksanaan pengelolaan Daerah yang baik merupakan wujud keberhasilan otonomi Daerah dan keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam sektor publik (pemerintahan), standar akuntansi yang digunakan adalah SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar

Akuntansi Pemerintahan sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik (*Patton dan Bean, 2015*). Beberapa pengungkapan yang terdapat dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang harus dibuat oleh pemerintah. Kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, akan mencerminkan kualitas, manfaat, dan kemampuan laporan keuangan itu sendiri (*Suhardjanto, Rusmin, Mandasari, dan Brown, 2017*). Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah telah mentaati SAP. Lebih lanjut, laporan keuangan tersebut telah memenuhi kriteria transparansi bagi pengguna laporan keuangan (*Bapepam, 2011*).

Penelitian tentang kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang penting dilakukan karena akan memberikan gambaran tentang sifat perbedaan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta memberikan petunjuk tentang kondisi pemerintah pada suatu masa laporan.

Kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga komponen yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory

report).

Dalam sektor publik/Pemerintahan, standar akuntansi yang digunakan adalah SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang telah ditetapkan sesuai peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. SAP bertujuan untuk membentuk transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari manajemen keuangan dengan mewajibkan Pemerintahan Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mendukung maka Pemerintah Daerah telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan penyelenggara negara bertanggungjawab untuk menyajikan informasi mengenai informasi kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan Pemerintahan dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terutama pada pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan merupakan sebuah mekanisme pertanggungjawaban dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, laporan keuangan harus disajikan dengan jelas dan tidak mengakibatkan kesalahpahaman bagi para pembaca

laporan. Karena laporan keuangan dibuat tidak hanya semata-mata untuk memenuhi peraturan yang berlaku saja, tetapi juga merupakan sebuah informasi yang dapat dipahami dan dapat digunakan untuk memenuhi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP yang berlaku kemudian di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan perlu di audit terlebih dahulu serta harus dilampiri dengan pengungkapan (Wulandari, 2009 : 38) karena laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme perlu pertanggungjawaban dan sebagai salah satu dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal (Fitria, 2006 : 26). Pengungkapan dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary Disclosure*) (Na'im dan Rakhman, 2000). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi yang berdasarkan Peraturan Pemerintahan (PP) nomor 71 tahun 2010.

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dengan menyatakan bahwa entitas pelapor mengungkapkan isi informasi tentang ketaatan terhadap anggaran. Pemenuhan atas pengungkapan juga berguna dan memudahkan pengguna dalam memahami sebuah laporan keuangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dan dapat digunakan dalam membuat

keputusan-keputusan ekonomi yang ditunjukkan dalam bentuk pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber yang dipercayakan dapat tercapai.

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain (Poerwadarminta, 2006 : 45) dengan demikian, karakteristik Pemerintahan Daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada Pemerintahan Daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakan dengan daerah lain.

Pada pengertian dari karakteristik untuk pengungkapan wajib ada beberapa faktor yang mendukung untuk terbitnya laporan yang mendukung untuk pengungkapan wajib yaitu ukuran pemerintah (*size*), jumlah SKPD, dan status daerah.

Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran pemerintah daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total asset yang dimiliki oleh suatu daerah (Pratiwi, 2016 : 32).

Jumlah SKPD adalah perangkat suatu daerah pada pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam pelaporan keuangan tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Keputusan 38/PM/1996 (Peraturan N0. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan) yang selanjutnya diubah Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Keputusan 134/BL/2006 (Peraturan Bapepam Nomor X.K.6). Alasan perlunya regulasi pengungkapan adalah penyalahgunaan, eksternalistas, asimetri informasi dan keengganan manajemen. Semua regulasi diarahkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kecurangan oleh para pelaku pasar modal terutama dalam masalah pengungkapan (Cahyani Nuswandari, 2009 : 37).

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Setyanigrum dan Febriyani Syafitri (2012) meneliti tentang Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Ukuran legislative, umur administrasi Pemda, kekayaan Pemda, dan Intergovernmental revenue. Variabel independen lainnya, yaitu ukuran Pemda, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang, dan Rasio kemandirian Keuangan Daerah tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Kota di Indonesia tahun anggakan 2008-2009.

Heri Atapson V Girsang (2015) Meneliti tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak satupun dari variable yang diuji yang menunjukkan adanya

pengaruh signifikan, atau dengan kata lain variabel ukuran Pemerintahan Daerah, rasio kemandirian keuangan Pemerintahan Daerah, diferensiasi fungsional Pemerintahan Daerah, pembiayaan utang Pemerintahan Daerah, tingkat ketergantungan Pemerintahan Daerah terhadap Pemerintahan Pusat, dan umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012.

Objek pada penelitian di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerbitkan laporan keuangan Neraca yang membantu penulis untuk menerbitkan pengungkapan wajib agar mengetahui permasalahan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel I.1
Pengungkapan Wajib pada Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019

No	Kabupaten atau Kota	Tahun	Ukuran Pemerintah	Jumlah SKPD	Pengungkapan Wajib
1	Kab. Banyusin	2017	3.269.834.710.215,23	22	22
		2018	3.376.278.00.718,15	22	19
		2019	3.315.329.060.450,90	22	21
2	Kab. Empat Lawang	2017	1.684.447.789.576,78	42	17
		2018	1.839.633.742.621,53	42	14
		2019	1.922.935.046.868,53	42	16
3	Kab. Lahat	2017	2.553.958.596.934,72	30	18
		2018	2.504.901.947.879,63	30	17
		2019	2.635.635.638.763,87	30	17
4	Kab. Muara Enim	2017	4.017.849.811.548,96	35	20
		2018	4.172.014.394.191,91	35	18
		2019	4.814.531.842.246,16	35	16
5	Kab. Musi Banyuasin	2017	5.047.268.834.255,13	30	19
		2018	5.459.326.344.015,47	30	18
		2019	6.085.621.582.332,89	30	21
6	Kab. Musi Rawas	2017	1.730.729.925.109,71	33	20
		2018	3.631.004.055.944,89	33	29

		2019	4.060.690.864.699,16	33	20
7	Kab. Musi Rawas Utara	2017	3.235.362.949.677,04	27	13
		2018	1.640.433.724.734,88	27	24
		2019	1.839.578.949.795,85	27	21
8	Kab. Ogan Ilir	2017	1.470.907.656.101,98	52	19
		2018	1.845.334.667.643,07	52	20
		2019	2.209.780.206.509,44	52	20
9	Kab. OKI	2017	2.958.787.603.985,14	33	15
		2018	2.900.880.329.864,79	33	21
		2019	3.280.973.761.541,89	33	23
10	Kab. OKU	2017	2.276.513.860.918,23	24	18
		2018	2.547.734.125.921,54	24	16
		2019	2.634.087.161.298,17	24	17
11	Kab. OKU Selatan	2017	2.483.730.792.899,01	37	15
		2018	2.566.662.713.990,91	37	18
		2019	2.753.185.536.036,17	37	17
12	Kab. OKU Timur	2017	1.828.766.737.660,54	23	21
		2018	1.981.148.336.567,41	23	20
		2019	2.323.377.022.865,44	23	18
13	Kab. PALI	2017	1.399.195.867.916,90	32	23
		2018	1.975.080.886.073,78	32	19
		2019	2.502.923.287.326,38	32	17
14	Kota Lubuklinggau	2017	2.187.943.946.179,58	30	24
		2018	2.263.020.667.68836	30	19
		2019	2.419.087.052.860,33	30	22
15	Kota Pagar Alam	2017	1.905.116.173.595,09	25	19
		2018	1.938.573.139.299,47	25	21
		2019	1.963.822.775.959,09	25	20
16	Kota Palembang	2017	11.797.058.242.180,80	29	22
		2018	12.496.295.686.158,42	29	23
		2019	11.523.675.156.231,80	29	21
17	Kota Prabumulih	2017	2.157.255.926.589,89	24	18
		2018	2.060.554.613.758,70	24	15
		2019	2.167.470.052.882,46	24	16

Sumber : BPKAD & data olah peneliti, 2021

Dari data tabel diatas Standar Akuntansi Pemerintah yang dipakai untuk perhitungan pengungkapan wajib sesuai PSAP nomor 5 sampai PSAP nomor 9, perhitungan 1 poin jika adanya laporan yang tertera di laporan keuangan kebijakan akuntansi yang diterbitkan, tetapi sebaliknya jika tidak tertera di laporan keuangan kebijakan akuntansi maka poinnya 0. Yang diketahui sesuai Item pengungkapan wajib LKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010. Jumlah SKPD yang dari tiap

kota berbeda mengakibatkan jumlah pada pengungkapan wajib jadi berbeda tiap tahunnya mengakibatkan adanya kenaikan dan penurunan dari pengungkapan wajib tersebut.

Pada contoh tabel diatas pada ukuran pemerintah Kab. Banyuasin pada periode tahun 2017 dan 2018 nampaknya kenaikan jumlah asset tetap tetapi pada pengungkapan wajib terjadinya penurunan karna dari jumlah laporan keuangan kebijakan akuntansi yang diterbitkan. Dan di tahun 2019 terjadinya penurunan tetapi jumlah pengungkapan wajib periode 2018 sampai 2019, yang tadinya pengungkapan wajib 19 naik menjadi 21 dikarenakan laporan keuangan pada kebijakan akuntansi yang diterbitkan adanya tambahan 2 poin.

Penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan pengungkapan wajib akun-akun yang terdapat pada neraca yang tertuang dalam standar akuntansi pemerintahan, karena pembuatan neraca merupakan hal baru bagi pemerintah daerah di Indonesia. Neraca mendapatkan perhatian penting karena disamping sarana pelaporan keuangan yang baru, neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh dari suatu entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu (Bastian, 2006: 432).

Hasil data tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap kualitas pengungkapan wajib ada masalah pada laporan keuangan Pemerintahan Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa berapa item yang ada pada pengungkapan wajib dapat mempengaruhi pengungkapan, karena insentif pelaporan keuangan untuk mendapatkan

opini yang alami, bukan dalam hal kualitas pengungkapan.

Mempertimbangkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bermaksud dengan tujuan untuk mencari lebih lanjut dari pengaruh karakteristik pemerintahan daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan demikian, penelitian ini berfokus kepada karakteristik pemerintahan daerah di Sumatra Selatan yang termasuk dalam kelompok struktur organisasi dan lingkungan eksternal dari Pemerintahan Daerah untuk menganalisis apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah pengaruh karakteristik pemerintahan daerah terhadap pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib pemerintahan daerah dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikn manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana berbagi pengetahuan dan mendukung penelitian-penelitian selanjutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengungkapan wajib dalam SAP.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Sebagai gambaran sejauh mana kelengkapan pengungkapan wajib telah disajikan serta bahan masukan agar lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Manfaat bagi Almamater

Adanya penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan juga informasi untuk seluruh pihak Universitas Muhammadiyah Palembang, terkhusus mengenai akuntansi pem

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. (2017). *Karakteristik Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arza, W. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1111-1130.
- Bastian. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitrisari, W. M. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audik BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-23.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hilmi, A. Z. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah. *Skripsi FE, UI*.
- Indonesia, M. K. (2021, 12). *Google*.
- Indonesia, P. R. (2021, 12). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia. *Skripsi*.
- Lubis, D. F. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Wajib Keuangan Perusahaan Otomotif Dan Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*.
- Misran, S. P. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* , 611-623.
- Nurabila, F. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Enrekang. *Skripsi*.
- Patrick. (2007). *The Determinants Of Organizational : The Adoption Of GASB 34 In Permnsylvania Local Goverment*. US: State University.
- Rahayu, S. (2008). Pengaruh Tingkat Pengungkapan Wajib dan Luas Pengungkapan Sukarela Terhadap Kualitas Laba. *studi pada perusahaan publik sektor manufaktur*, 1-43.
- RI, B. K. (2022, 01). *Kemenkeu*. Diambil kembali dari Google: <https://fiskal.kemenkeu.go.id>

- Rizta, N. A. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Intergovernmental Revenue, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*.
- Sari, A. D. (2016). jurnal. *Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 1-25.
- Setyowati, L. (2016). Determinan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 45-62.
- Suhardjanto, D. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 30-42.
- Sulaiman, W. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian, Tingkat Ketergantungan, Dan Kekayaan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Dengan Variabel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*.
- Verawaty, A. K. (2018). Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam LKPD Provinsi Di Indonesia. *Seminar Penelitian Vokasi*, 46-53.
- Wijayanti, Y. (2018). Pengaruh Size, Belanja Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah. *Skripsi*.
- Yulianingtyas, D. S. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . *Jurnal Akuntansi & Auditing*.
- Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*.